

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aid, Action, 2017, *Free, Prior, Informed Consent (FPIC) A Brief Manual*, Natural Resource Knowledge Activist Hub, Bhubaneswar
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016, *Free Prior and Informed Consent: An Indigenous People's Right and A Good Practice for Local Communities*, FAO, Global
- H., Siregar, 2012, *Perubahan Ketentuan Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012*, Penerbit Hukum Indonesia, Jakarta.
- Hetharia, Melkias, 1966, *Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta
- Huda, Ni'Matul, 2013, *Masa Depan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perpektif Yuridis*, Nusamedia, Bandung.
- Ingram, Gregory K., Hong, Yu-Hung, 2009, *Property Right and Land Policies*, Lincoln Institute of Land Policy.
- Kim, Iljoong, *et.al.*, 2017, *Eminent Domain: A Comparative Perspektif*, Cambrige University Press.
- Kitay, Michael G., 1985, *Land Acquisition in Developing Countries: Policies and Policies for the Public Sector*, Lincoln Institute of Land Policy Book.
- Maytha, N. L. Gedhe, Salim, M. Nazir, 2020, *Berakhir di Temon: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk Yogyakarta International Airport*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta.
- Miceli, Thomas J., 2011, *The Economic Theory of Eminent Domain Private Property, Public Use*, Cambridge University Press
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhsin, Ahmad, *et.al.*, 2019, *Surat Kekancingan Tanah Sultan Gruond: Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Karaton Yogyakarta*, Penerbit Buku Deepublish, Sleman.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

- Ramesh, J., Khan, Muhammad A., 2015, *Legislating for Justice: The Making of the 2013 Land Acquisition Law*, Oxford University Press.
- Safitri, Myrna A., 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Solikin, H. Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuran, Qiara Media.
- Staubach, Peter G., 2018, *The Rule of Unwritten Internasional Law: Customary Law, General Principles, and World Order*, Routledge, New York.
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kombinasi Edisi 3*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria W., 2009, *Tanah dalam Perpsektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria W., 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Warman, Kurnia, 2023, *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono*, Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia, Genta, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.75)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107)

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigas atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 182)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 426)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 115)

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918

## Artikel Jurnal

- Agung Dian, Prima Ananda, dan Cindy Almonika. *“Mendudukkan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta”*, Jurnal Rechtvinding, Vol. 8 No. 3, 2019
- Anggreani, Tyas Dian, *“Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan di Daerah istimewa Yogyakarta”*. Jurnal Rechtvinding, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2012
- Disantara, Fradana Putra, *“Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum”*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 6, No. 1, 2021
- Harahap, Roosdiana, *“Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”*, Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1, 2023
- Huda, Ni'matul, *“Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13, April 2000
- Ismail, Nurhasan, *“Mimbar Hukum Edisi Khusus: Pilihan Status Hukum Karaton dan Hak Atas Tanah Sebagai Unsur Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”* Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus, 2007
- Istanto, F. Sugeng, *“Mimbar Hukum Edisi Khusus: Kedudukan Karaton Dalam Sistem Pemerintahan Daerah”*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus, 2007
- Rudiana, Irna, et.al., *“Implementasi Teoritik dan Praktik Asas Tujuan Hukum Pada Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Strategis Nasional”*, Jurnal Inovasi dan Kreativitas, Vol. 2, No. 2, 2022
- Subekti, *“Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”*, Yustisia, Vol. 5, No. 2, 2016
- Sumardjono, Maria S.W., *“Mimbar Hukum Edisi Khusus: Keistimewaan Yogyakarta Di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Karaton Dalam Lingkup Hukum Tanah Nasional”*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus, 2007
- Wardana, Agung, *“Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah”*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 2022



Winarda, Rachma Z., *et.al.*, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)”, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Adrianti, Rosita, 1992, *Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta di Kotamadya Surabaya (Suatu Tinjauan Yuridis Dari Aspek Pemberian Ganti Rugi)*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Dwipraetya, Thio A., 2016, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fauziah, Aghisna Nurfahmi, 2017, *Aspek Hukum Tanah Magersari di Karaton Yogyakarta (Studi atas Status Tanah Karaton di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Paurindra E., Mohammad, 2019, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Simanjuntak, Kasdin, 2008, *Penerapam Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Syafitri, Gabriena Reki, 2021, *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang.

### Internet

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Sekilas Kota Yogyakarta”, <https://budaya.jogjaprovo.go.id/artikel/detail/161-sekilas-kota-jogja>, diakses tanggal 11 Juli 2024

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, “Cikal Bakal Karaton Yogyakarta”. <https://www.Karatonjogja.id/cikal-bakal/#:~:text=Perjanjian%20Giyanti%20yang%20ditandatangani%20pada,Hadiningrat%20dan%20Kasultanan%20Ngayogyakarta%20Hadiningrat>, diakses 12 Juni 2024

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, “Tata Rakit Pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat”. <http://www.Karatonjogja.id/struktur/>, diakses tanggal 13 Juni 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen”, <https://bpjt.pu.go.id/berita/penandatanganan-perjanjian-pengusahaan-jalan-tol-yogyakarta-bawen>, diakses tanggal 16 September 2023

Kementerian PUPR, “Kemeterian PUPR Targetkan 13 Ruas Jalan Tol Baru Sepanjang 309.78 km Beroperasi Hingga Akhir 2023”, <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-13-ruas-jalan-tol-baru-sepanjang-30978-km-beroperasi-hingga-akhir-2023>, diakses tanggal 8 Juni 2023

Maftuchan, A.H., “Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia”, <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/viewFile/108/102>, diakses tanggal 28 September 2023

Nanda, Aji Dwi, “Jalan Tol: Perkuat Konektivitas Negeri, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16094/Jalan-Tol-Perkuat-Konektivitas-Negeri-Meningkatkan-PertumbuhanEkonomi.html#:~:text=Dengan%20adanya%20jalan%20tol%20C%20daerah,dan%20meningkatkan%20pemerataan%20hasil%20pembangunan>, diakses tanggal 8 Juni 2023

Noviantika, Tria, “Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN)”, <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/>, diakses tanggal 28 November 2023

Parliament, Scottish, “Abolition of Feudal Tenure”, [http://www.andyweightman.com/docs/spice\\_feudal.pdf](http://www.andyweightman.com/docs/spice_feudal.pdf), diakses tanggal 26 November 2023

PT Jasamarga Jogja Bawen. “Profil Perusahaan”. [jjb.co.id. http://jjb.co.id/profil-perusahaan/](http://jjb.co.id/profil-perusahaan/), diakses tanggal 13 Juni 2024

Santoso, M. Imam, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian” <https://media.neliti.com/media/publications/275401-kedaulatan-dan-yurisdiksi-negara-dalam-s-2c304abe.pdf>, diakses tanggal 26 November 2023



Shidarta, “Asas Die Normative Kraft Des Faktischen”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-der-normativen-kraft-des-faktischen/>, diakses tanggal 18 Juli 2024

Sumartono, Maria S. W., “Proyek Strategis Nasional”, <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>, diakses tanggal 2 September 2023

Thaib, Dahlan, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis, dan Yuridis” <https://media.neliti.com/media/publications/80756-none-8a5f01a7.pdf>, diakses tanggal 1 Desember 2023

Wahyuni, Della Sri, “Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan”, [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della\\_Pluralisme-Hukum-dalam-Perkembangan-Hukum-Indonesia.p](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della_Pluralisme-Hukum-dalam-Perkembangan-Hukum-Indonesia.p), diakses tanggal 1 Desember 2023

### **Lain-Lain**

*Declaration on the Right to Development*

Amandemen ke-5 Konstitusi Amerika Serikat